PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIWILAYAH HUKUM POLDA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

Nama : FADLUL SYAWAL

NIM : 1574201138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2019

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diwilayah hukum Polda Riau.

Dengan rumusan masalah bagamanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diwilayah hukum Polda Riau. Dan upaya pelaksaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diwilayah hukum Polda Riau, serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diwilayah hukum Polda Riau.

Metode penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis,dengan mengambil lokasi penelitian diwilayah hokum Polda Riau, pengumpulan data dengan 4 langkah observasi, kusioner, wawancara, dan kajian pustaka pada analisa data digunakan metode induktif dan deduktif

Kesimpulan penelitian pada skripsi ini adalah penelitian sosiologis dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tidak terlaksana dengan baik, dimana masih banyak ditemukan kendala-kendala terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media online. Disarankan agar didalam Penegakan hukum ini Pemerintah juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul khususnya terkait alat bukti elektronik. Perlunya untuk meningkatkan sarana bagi penyidik khususnya pada bidang cyber crime. Mengingat kebutuhan akan sarana menjadi salahsatu faktor pendukung untuk mengungkan kejahatan dalam